

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

2.1.1 Definisi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

Rawun & Oswald Tumilaar (2019) mengungkapkan UMKM merupakan suatu aktivitas ekonomi dalam ruang lingkup yang kecil, namun dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam perekonomian negara. Akan penting adanya laporan keuangan yang sesuai berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang telah menerbitkan SAK untuk Entitas Mikro Kecil Menengah (EMKM) pada tanggal 24 Oktober 2016 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Kontrak Diterbitkannya SAK EMKM bertujuan untuk menerapkan pada entitas tanpa akuntabilitas publik.

Pada biasanya para pelaku UMKM tidak membuat laporan keuangan, dikarenakan tidak paham cara penyusunan laporan keuangan dan pelaku UMKM tersebut tidak adanya keinginan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Padahal melalui laporan keuangan itulah kita dapat mengetahui apakah usaha yang kita dirikan mengalami laba atau sebaliknya.

2.1.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 BAB I Pasal 1, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha milik usaha menengah atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil, dikuasai atau langsung atau tidak langsung. Salah satu yang dapat melainkan UMKM dapat dilihat dari jumlah omset penjualan tahunan usaha, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Tabel 2. 1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

No	Tingkatan	Kriteria	
		Aset	Omset Penjualan
1	Usaha Mikro	Maksimal Rp50.000.000,00	Maksimal Rp300.000.000,00
2	Usaha Kecil	>Rp50.000.000,00- Rp500.000.000,00	>Rp300.000.000,00- Rp2.500.000.000,00
3	Usaha Menengah	>Rp500.000.000,00- Rp10.000.000.000,00	>Rp2.500.000.000,00- Rp50.000.000.000,00

Sumber: Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

Adapun penjelasan masing-masing dari tabel diatas, sebagai berikut:

1. Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
2. Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
3. Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah).

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah tenaga kerja pada UMKM kurang dari seratus orang, dengan golongan berikut:

1. Satu hingga empat orang tenaga kerja untuk usaha rumah tangga dan mikro
2. Lima hingga sembilan belas tenaga kerja untuk usaha kecil
3. Dua puluh hingga sembilan puluh sembilan tenaga kerja untuk usaha menengah
4. Seratus tenaga kerja atau lebih untuk usaha besar

Sesuai dengan perkembangannya, UMKM diklasifikasikan menjadi empat kriteria, yaitu:

1. *Livelihood Activities*

UMKM biasanya dipakai sebagai kesempatan kerja untuk mengejar rezeki.

2. *Micro Enterprise*

UMKM adapun memiliki jiwa pengrajin, namun tidak berkarakter kewirausahaan.

3. *Small Dynamic Enterprise*

Biasanya UMKM memiliki karakter yang bersemangat dalam berwirausaha dan mampu menerima suatu pekerjaan subkontrak dan ekspor.

4. *Fash Moving Enterprise*

UMKM mempunyai antusiasme mengenai kewirausahaan dan akan melakukan suatu perubahan menjadi usaha yang lebih besar lagi.

2.1.3 Peran Akuntansi Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam Wilantara & Susilawati (2016) mengelola suatu usaha, salah satu hal yang krusial melainkan terkadang menganggap remeh oleh beberapa orang. Tidak sedikit dari mereka yang berkata bahwa menjalankan suatu usaha dalam skala yang kecil itu tidak perlu susah-susah mengatur

keuangan usaha karena semua pasti dapat dikendalikan. Sementara itu, walaupun suatu usaha masih dalam skala yang kecil, mengelola keuangan adalah suatu hal yang sangat penting dan harus dipertimbangkan. Berikut dibawah ini termasuk peran akuntansi dalam UMKM:

1. Memonitor keuangan usaha

Dengan adanya laporan keuangan usaha, pelaku usaha diharuskan mencatat semua pengeluaran dan pemasukan untuk penyusunan laporan keuangan. Dengan begitu pelaku UMKM dapat mengetahui sudah berapa banyak uang yang keluar dan masuk untuk bulan berjalan. Hal ini akan membantu pelaku usaha untuk memonitor keuangan usahanya agar lebih tertata.

2. Mengetahui kondisi bisnis

Dari laporan keuangan, pelaku usaha dapat mengetahui kondisi usahanya. Pelaku usaha dapat mengetahui berapa besarnya rugi atau laba yang dihasilkan dari usahanya.

3. Membantu proses peminjaman dana

Laporan keuangan yang menjadi syarat untuk peminjaman dana untuk suatu usaha. Dari laporan keuangan tersebut dapat dilihat kondisi keuangan stabil atau tidaknya suatu usaha. Kondisi keuangan yang baik dapat membuat calon pemberi pinjaman itu yakin akan menginvestasikan sebagian uangnya pada orang yang tepat.

4. Menentukan target selanjutnya

Laporan laba rugi dapat memberikan informasi seberapa usaha yang dikelola berkembang. Dari situ pelaku usaha dapat merencanakan target apa yang akan diambil selanjutnya.

2.1.4 Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia

Pada tahun 1997 hingga 1998 saat terjadinya krisis ekonomi telah melanda Indonesia yang menimbulkan banyak perusahaan besar yang terpaksa menghentikan kegiatannya, akan tetapi UMKM dapat

bertahan di kala krisis tersebut. Hal tersebut dikarenakan banyaknya UMKM yang tidak bergantung pada modal besar maupun pinjaman, melainkan lebih banyak menggunakan modal sendiri/pribadi dan sedikit saja yang berasal dari pihak perbankan salah satunya. Bersumber pada survei Bank Indonesia (BI) dalam Wilantara & Susilawati (2016), per Januari 2015 diketahui bahwa modal pribadi yang digunakan sebagai modal usaha sebanyak 82,7%, sedangkan dari sumber lain hanya sebanyak 17,3%, diantaranya bersumber dari perbankan sebanyak 13%. Pinjaman perbankan kepada UMKM per Juni 2015 sebanyak 19,8% dan pinjaman masih kebanyakan dari usaha menengah diikuti oleh usaha kecil. Bagian terkecil diterima oleh usaha mikro padahal usaha ini dihuni oleh 84,5% .

UMKM dapat menembus banyak tenaga kerja pada saat terjadinya krisis ekonomi, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan UMKM lebih banyak menyerap tenaga kerja pada tahun 1997 hingga tahun 1998, bila dibandingkan dengan usaha berskala besar.

Tabel 2.2 Penyerapan Tenaga Kerja Pada Tahun 1997-1998

1997	Perusahaan Skala Kecil	57,40 juta	87,62%
	Perusahaan Skala Menengah	7,7 juta	11,75 %
	Perusahaan Skala Besar	0,393 juta	0,61%
1998	Perusahaan Skala Kecil	57,34 juta	88,66%
	Perusahaan Skala Menengah	6,9 juta	10,78%
	Perusahaan Skala Besar	0,364 juta	0,56%

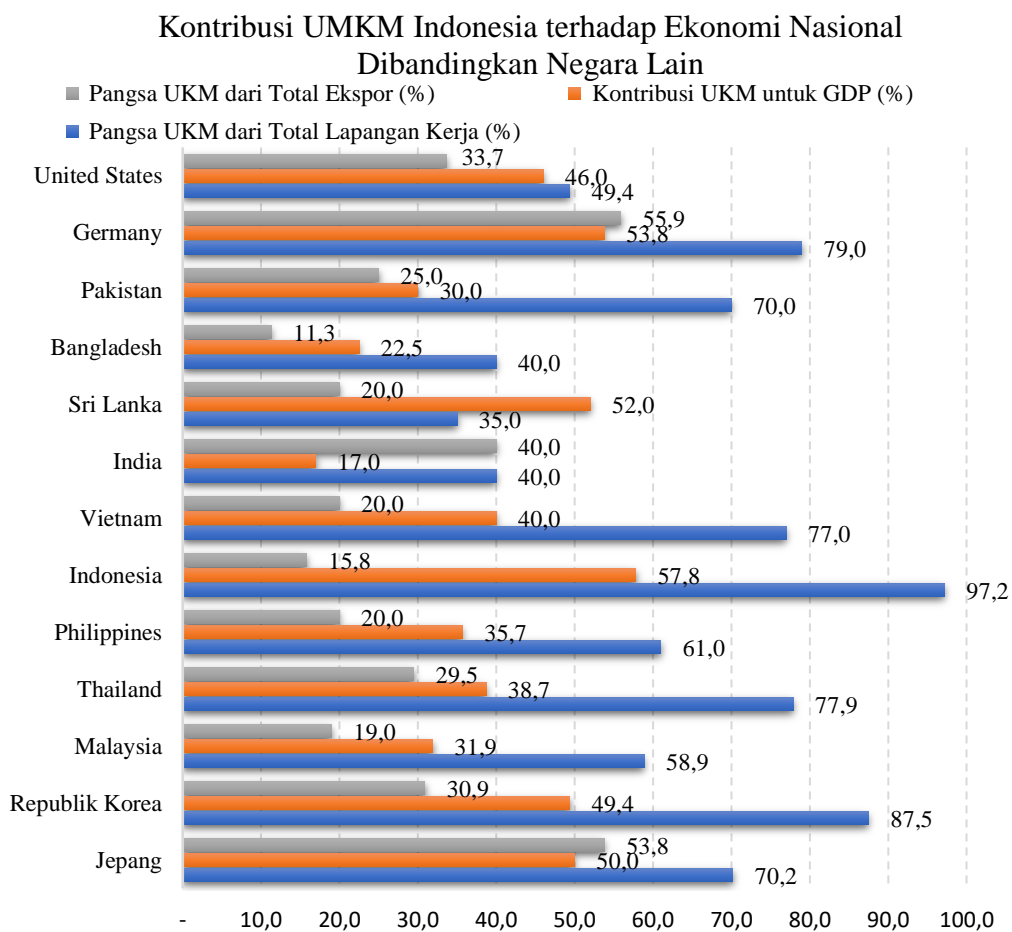
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tidak hanya menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia, produk-produk yang dihasilkan UMKM dapat mendobrak pasar internasional, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasca terjadinya krisis ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan.

2.1.5 Kinerja dan Kontribusi UMKM

Dalam Wilantara & Susilawati (2016) terdapat grafik yang menunjukkan mengenai bagaimana kinerja serta kontribusi UMKM di beberapa negara dan dapat dibandingkan dengan dengan kontribusi di Indonesia, terlihat kontribusi UMKM di Indonesia termasuk dalam keadaan baik dan bersifat strategis walaupun di tengah ketergantungan.

Grafik 2.1 Kontribusi UMKM Indonesia Terhadap Ekonomi Indonesia Dibandingkan Negara Lain



Berdasarkan grafik diatas, terlihat kontribusi UMKM Indonesia atas ketersediaannya kesempatan kerja sangat tinggi, yaitu sebanyak 97,2%. Dengan memberikan kontribusi untuk PDB (Produk Domestik Bruto) yang paling tinggi dibanding dengan negara lain di Asia, yaitu 57,8%. Meskipun

UMKM Indonesia masih menanggapi pasar lokal, hal ini diyakinkan oleh rendahnya persentase nilai ekspor hanya 15,8%. Hal ini cukup lazim karena luasnya pasar dalam negeri disamping itu pemahaman oleh pelaku UMKM terhadap kegiatan ekspor masih minim.

2.1.6 Peran Pemerintah dalam Membina UMKM

Dilansir dari *website* Sobat Pajak (2021) UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Kebutuhan impor yang tidak dapat terpenuhi, disebabkan kondisi Indonesia sedang diserang pandemi, padahal UMKM dapat mengendalikan pasar luar negeri.

Keberadaan UMKM merupakan solusi untuk memenuhi permintaan impor yang terkepung saat ini. Akibat dari pandemi ini akan dirasakan oleh pelaku UMKM dan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan khusus bagi pelaku UMKM untuk membantu mereka di masa pandemi.

Berikut merupakan beberapa kebijakan Pemerintah dalam membina UMKM pada masa pandemi:

1. Prioritas dukungan

Pemerintah memprioritaskan dukungan kepada UMKM dalam rencana penanganan Covid-19/Omicron dan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah akan memprioritaskan alokasi dana khusus untuk mendukung usaha kecil, menengah dan mikro. Pada tahun 2020, pemerintah akan mengalokasikan Rp123.460.000.000,00 (Seratus dua puluh tiga triliun empat ratus enam puluh juta rupiah) dari Rp695.200.000.000,00 (Enam ratus sembilan puluh lima triliun dua ratus juta rupiah) untuk mendukung UKM.

2. Restrukturisasi Kredit UMKM

Kebijakan pemerintah untuk merestrukturisasi kredit UMKM dilakukan sebagai berikut:

1. Relaksasi penilaian kualitas aset
2. Menunda pokok dan subsidi bunga

3. Kredit modal kerja UMKM

Pemerintah memberikan program kredit dan modal kerja berbunga rendah dengan menempatkan dana negara dalam bentuk deposito pemerintah atau giro pada bank umum koperasi. Jumlahnya Rp 30.000.000.000,00 (Tiga puluh triliun rupiah). Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan jaminan pinjaman modal kerja bagi peserta UKM.

4. Dukungan lainnya

Pemerintah juga menawarkan dukungan lain untuk membantu UMKM selama pandemi termasuk tidak perlu membayar insentif PPh Final UMKM karena akan ditanggung oleh pemerintah serta mendapatkan bantuan produktif usaha mikro (BPUM)

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut PSAK dalam Harmony (2021) Laporan keuangan merupakan bagian dari suatu proses pelaporan. Laporan keuangan yang lengkap pada umumnya mencakup neraca (*Balance Sheet*), laporan laba rugi (*Income Statement*), laporan perubahan posisi keuangan (*Owner's Equity Statement*), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

(Warsadi et al., 2018) menyimpulkan laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi baik transaksi pengeluaran serta pemasukan dan transaksi lainnya. Biasanya laporan keuangan dibuat dalam rentang waktu tertentu. Ketentuannya dapat ditentukan oleh prosedur perusahaan itu sendiri, apakah dibuat setiap bulan atau setiap satu tahun sekali. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi keuangan keseluruhan dalam suatu perusahaan atau usaha. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat untuk menganalisis kemampuan keuangan perusahaan, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar membuat keputusan-keputusan ekonomi.

Dapat disimpulkan definisi laporan keuangan merupakan suatu informasi yang diperoleh melalui pencatatan transaksi-transaksi dan dapat dipergunakan untuk melihat perkembangan suatu perusahaan atau usaha serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah (SAK EMKM) ini bertujuan untuk memajukan kemampuan bersaing UMKM melalui optimalisasi penyusunan laporan keuangan, karena banyak dari pelaku UMKM yang belum menyadari akan pentingnya laporan keuangan dalam suatu usaha, bahkan menganggap tidak memerlukan laporan keuangan karena cukup merepotkan dan rumit dalam penyusunannya.

Irham (2012) mengungkapkan terkait tujuan laporan keuangan secara umum, yakni:

1. Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan status perusahaan dalam bentuk angka satuan keuangan.
2. Memberikan informasi yang berguna kepada investor, kreditur, manajemen, pemerintah, dan pengguna lain dari pembuat keputusan komersial dan ekonomi yang ada dan terampil.
3. Memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan, kinerja, dan perubahan kondisi keuangan yang membantu sejumlah besar pengguna dalam membuat keputusan ekonomi.
4. Penyajian status keuangan, kinerja perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya.

Tujuan laporan keuangan menurut SAK EMKM dalam (Uno et al., 2019) adalah untuk menyajikan informasi posisi keuangan dan kemampuan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pengguna tersebut meliputi sumber daya bagi entitas, seperti kreditur maupun investor.

Menurut IAI (2016) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kapabilitas keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan juga dapat melihat hasil pertanggungjawaban manajemen atas pemakaian sumber daya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang terdiri: aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban.

Selain itu, tujuan dari laporan keuangan untuk menjalankan sistem akuntansi sederhana yang dapat membantu dan mempermudah pemilik usaha dalam membuat laporan keuangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dengan laporan keuangan diharapkan para pelaku UMKM dapat memonitor usahanya dan menggunakan informasi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan.

2.2.3 Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan secara universal menurut PSAK 1 dalam Harmony (2021) terdiri dari:

1. Neraca (*Balance Sheet*)

Neraca adalah suatu pernyataan tertulis yang mencerminkan aktiva, utang serta modal suatu perusahaan pada periode tertentu.

2. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memperlihatkan hasil suatu usaha yang sedang dijalankan dalam periode tertentu.

3. Laporan Perubahan Modal (*Owner's Equity Statement*)

Laporan perubahan modal adalah suatu laporan yang berisikan informasi mengenai laba rugi secara terpisah, dividen yang diakui serta dividen per lembar saham dan informasi lainnya.

4. Laporan Arus Kas (*Cash Flows Statement*)

Laporan arus kas adalah laporan yang memuat informasi perubahan historis dalam kas dan setara kas berdasarkan aktivitas operasi pada suatu periode.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang disusun berdasarkan laporan keuangan. Catatan yang dimaksud yaitu memberikan informasi mengenai penjelasan pada laporan keuangan, sehingga dapat mudah dimengerti.

2.2.4 Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Keuangan

Dolok S & Tambunan (2021) mengungkapkan prinsip penyusunan laporan keuangan, meliputi:

1. Prinsip Biaya Historis (*Historical Cost Principle*)

Prinsip ini berlaku ketika harga pembelian ditentukan oleh lebih dari satu orang sehubungan dengan aset, kewajiban, modal, dan biaya.

2. Prinsip Pengakuan Pendapatan (*Revenue Recognition Principle*)

Dalam prinsip ini yang ingin ditekankan adalah mengenai bagaimana perlakuan waktu serta besarnya nilai yang akan dilaporkan dan dicatat. Perlakuan prinsip ini akan mengarahkan terhadap pengakuan pendapatan, apakah berdasarkan *Cash Basic* atau *Accrual Basic*.

3. Prinsip Memperbandingkan (*Matching Principle*)

Akan membandingkan pendapatan dengan biaya atau pengeluaran.

4. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Menyajikan informasi secara lengkap dalam laporan keuangan. Dengan kata lain kebijakan, metode, teknik, perubahan-perubahan yang terjadi harus diungkapkan dengan catatan yang belum dijelaskan dalam laporan keuangan.

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

2.3.1 Definisi Standar Akuntansi Keuangan EMKM

Dalam (Nuvitasari et al., 2019) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) merupakan standar akuntansi keuangan yang sangat sederhana dan mudah dimengerti bila dibandingkan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK EMKM ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi syarat untuk penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Dengan dikeluarkannya SAK EMKM, peserta UMKM harus mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, sehingga SAK EMKM dapat memberikan informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan yang bijaksana dan digunakan sejumlah para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Dalam Laraswati, (2020) Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) terpenting Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) serta Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, PSAK serta ISAK.

Terdapat empat SAK yang berlaku di Indonesia yaitu:

1. SAK digunakan untuk badan yang memiliki akuntabilitas publik.
2. SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).
3. SAK-Syariah (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah) digunakan sebagai pedoman kebijakan Lembaga Syariah.
4. SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).

Ditunjukkan untuk entitas pemerintah

Kemudian Ikatan Akuntansi Indonesia melakukan penyusunan standar yang lebih sederhana dari SAK ETAP yakni SAK EMKM. Diterbitkannya SAK EMKM dikarenakan masih banyak para UMKM yang belum mampu dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penyusunan SAK EMKM bersumber pada Undang-Undang No. 20 Tujuan diterbitkannya standar ini adalah untuk membantu pelaku UMKM menerapkan akuntansi sesuai standar yang masih dianggap kompleks saat menggunakan SAK ETAP. Kebijakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang baru telah disetujui dan diperlukan panduan karena memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang Standar Akuntansi Keuangan UMKM. Pada tanggal 18 Mei 2016, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengadakan rapat untuk menyusun dan menyetujui “Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah” (ED SAK EMKM), dan pada tanggal 24 Oktober 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menyetujui Standar Akuntansi Keuangan Bagi Badan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang diumumkan berlaku efektif pada 1 Januari 2018, namun merekomendasikan penerapan lebih awal. Standar ini dirancang untuk memenuhi kepentingan pelaporan keuangan entitas UMKM Sholikin & Setiawan (2018).

2.3.2 Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

V. Wiratna Sujarweni (2021) mengungkapkan bahwa Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2009, dan digunakan sebagai pedoman bagi UMKM di Indonesia agar dapat menyusun laporan keuangan. Diterbitkannya SAK ETAP bagi UMKM dengan tujuan agar para pelaku UMKM dapat meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas UMKM melalui informasi keuangan yang disajikan.

Dalam SAK ETAP, laporan keuangan yang lengkap terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Perkembangannya SAK ETAP kurang sederhana dalam menyusun laporan keuangan UMKM, sehingga pada akhir tahun 2016 IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM

merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan SAK ETAP, karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh UMKM. Laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Adanya SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan sehingga memudahkan para pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pendanaan dari berbagai lembaga keuangan.

2.3.3 Jenis Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Menurut SAK EMKM (2016) laporan keuangan yang wajib disusun oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

a) Laporan Posisi Keuangan

Laporan keuangan yang menyajikan informasi meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada setiap akhir periode pelaporan. Pos-pos yang mencakup laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas. Entitas menyajikan suatu akun dalam laporan posisi keuangan, jika penyajian akun tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap akun-akun dalam penyajiannya. Namun, penyajian pos-pos aset entitas dapat diatur berdasarkan likuiditas dan pos-pos liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo.

Tabel 2.3 Format Laporan Posisi Keuangan

ENTITAS			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
31 DESEMBER 20xx DAN 20xx			
	Catatan	20xx	20xx
ASET			
Kas dan setara kas			

Kas	3	XXX	XXX
Giro	4	XXX	XXX
Deposito	5	XXX	XXX
Jumlah kas dan setara kas		XXX	XXX
Piutang Usaha	6	XXX	XXX
Persediaan		XXX	XXX
Beban dibayar dimuka	7	XXX	XXX
Aset Tetap		XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan		XXX	XXX
JUMLAH ASET		XXX	XXX
LIABILITAS			
Utang Usaha		XXX	XXX
Utang Bank	8	XXX	XXX
JUMLAH LIABILITAS		XXX	XXX
EKUITAS			
Modal		XXX	XXX
Saldo Laba	9	XXX	XXX
JUMLAH EKUITAS		XXX	XXX
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		XXX	XXX

Sumber: Exposure Draft SAK EMKM, 2016

b) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menyediakan informasi kemampuan keuangan entitas yang terdiri dari informasi mengenai pendapatan dan beban selama periode tertentu. Menurut SAK EMKM (2016) laporan laba rugi merupakan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode. Pos-pos yang melibatkan laporan laba rugi entitas yaitu

pendapatan dan beban. Semua pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu periode harus disajikan secara keseluruhan.

Tabel 2.4 Format Laporan Laba Rugi

ENTITAS			
LAPORAN LABA RUGI			
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20xx DAN 20x			
	Catatan	20xx	20xx
PENDAPATAN			
Pendapatan Usaha	10	XXX	XXX
Pendapatan Lain-lain		XXX	XXX
<i>JUMLAH PENDAPATAN</i>		<i>XXX</i>	<i>XXX</i>
		<i>XXX</i>	<i>XXX</i>
BEBAN			
Beban Usaha		XXX	XXX
Beban Lain-lain	11	XXX	XXX
<i>JUMLAH BEBAN</i>		<i>XXX</i>	<i>XXX</i>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		XXX	XXX
Beban Pajak Penghasilan	12	XXX	XXX
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		XXX	XXX

Sumber: Exposure Draft SAK EMKM, 2016

c) **Catatan Atas Laporan Keuangan**

Menurut SAK EMKM (2016) catatan atas laporan keuangan yaitu suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh tiap entitas. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Menurut SAK EMKM dalam Sujarweni (2021), catatan atas laporan keuangan disajikan UMKM perlu memuat:

1. Sesuai pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM
2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
3. Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Unsur-unsur pada laporan keuangan didefinisikan sebagai berikut menurut SAK EMKM (2016) yaitu:

1. Aset, adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari manfaat ekonomik dimasa depan diharapkan akan diperoleh entitas.
 - 1) Aset Lancar
Aset lancar yaitu aset yang dapat ditukar menjadi uang tunai dalam satu tahun atau kurang dari satu tahun.
 - 2) Aset tidak lancar

Aset tidak lancar yaitu aset yang membutuhkan waktu lebih lama saat mencairkannya menjadi uang tunai, atau bahkan tidak bisa dicairkan sama sekali.

2. Liabilitas, adalah kewajiban entitas yang timbul dari peristiwa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.

- 1) Liabilitas Lancar

Liabilitas lancar yaitu utang dengan kewajiban yang harus segera dilunasi dengan tempo jangka pendek atau kurang dari satu tahun.

- 2) Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang yaitu utang yang harus segera dilunasi dengan tempo dalam satu tahun lebih.

3. Ekuitas, adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

Informasi kinerja entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan diterangkan dalam laporan laba rugi.

1. Penghasilan (*Income*), adalah peningkatan atau penurunan jumlah aktiva atau kewajiban usaha yang berasal dari aktivitas penjualan barang atau jasa pada satu periode akuntansi.
2. Beban (*Expenses*), adalah biaya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan selama satu periode akuntansi.

Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi yang relevan, tepat, keterbandingan, dan kesepahaman. Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan. Laporan keuangan minimal terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
2. Laporan laba rugi selama periode

3. Catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu.

Laporan posisi keuangan entitas mencakup pos-pos berikut:

1. Kas dan setara kas, adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
2. Piutang, adalah salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari.
3. Persediaan, aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional.
4. Aset tetap, adalah aktiva tidak lancar yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.
5. Utang usaha, adalah kewajiban perusahaan akibat adanya transaksi pembelian barang maupun jasa yang berhubungan dengan operasional perusahaan dan dibayar secara angsuran dalam jangka waktu singkat.
6. Utang bank, Hutang yang timbul sebagai akibat pinjaman yang diberikan oleh bank kepada perusahaan
7. Ekuitas, hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas (kewajiban) dalam neraca.

Laporan laba rugi entitas mencakup pos-pos berikut:

1. Pendapatan, adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan.
2. Beban keuangan, merupakan biaya atas biaya yang timbul dari pinjaman atau kreditor.
3. Beban pajak, merupakan jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam penghitungan

laba rugi akuntansi pada satu periode berjalan sebagai beban atau penghasilan.

Tabel 2.5 Format Catatan Atas Laporan Keuangan

ENTITAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7
<p>1. UMUM</p> <p>Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20x7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Utara.</p> <p>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING</p> <p>a. Pernyataan Kepatuhan</p> <p>Laporan keuangan disusun menggunakan Standart Akuntansi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>b. dasar Penyusunan</p> <p>Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.</p> <p>c. Piutang Usaha</p> <p>Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.</p> <p>d. Persediaan</p> <p>Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan overhead. Overhead tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. Overhead variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan akrual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.</p> <p>e. Aset Tetap</p>

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan penjualan diakui tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.

g. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. KAS

	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Kas kecil jakarta – Rupiah	xxx	xxx

4. GIRO

	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx

5. DEPOSITO

	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx

Suku Bunga Deposito:

	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Rupiah	xxx	xxx

6. PIUTANG USAHA

	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Toko A	xxx	xxx
Toko B	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

7. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Sewa	xxx	xxx
Asuransi	xxx	xxx
Lisensi dan perizinan	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

8. UTANG BANK

Pada tanggal 4 Maret 20x8, Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit Rpxxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 20X8. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.

9. SALDO LABA

Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.

10. PENDAPATAN PENJUALAN

	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Penjualan	xxx	xxx
Retur Penjualan	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

11. BEBAN LAIN-LAIN

	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Bunga Pinjaman	xxx	xxx
Lain-lain	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

12. BEBAN PAJAK PENGHASILAN

	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Pajak Penghasilan	xxx	xxx

Sumber: Exposure Draft SAK EMKM, 2016

2.3.4 Asumsi Dasar Laporan Keuangan Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Dalam Khasanah (2019) untuk menyusun laporan keuangan harus didasarkan pada anggapan akuntansi sebagai berikut:

1. Dasar Akruai

Menurut IAI (2016) entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akruai. Dalam dasar akruai, akun-akun diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi kriteria pengakuan untuk masing-masing akun tersebut.

2. Kelangsungan Usaha

Menurut IAI (2016) dalam SAK EMKM pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen menggunakan SAK EMKM dalam membuat penilaian atas kinerja entitas untuk melanjutkan usahanya di masa selanjutnya. Jika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta mengapa entitas tidak mempunyai kelangsungan usaha.

3. Konsep Entitas Bisnis

Menurut IAI (2016) dalam SAK EMKM, entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan rancangan entitas bisnis. Transaksi yang berkaitan dengan bisnis tersebut harus dapat dipisahkan dari transaksi pemilik bisnis tersebut, maupun dari entitas lainnya.